



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jln. Perwakilan No.1 Wates, Kabupaten Kulon Progo 55611, Telp.(0274) 773247, 773010 Psw.1202, Fax.(0274) 774126  
Email: [bappeda@kulonprogokab.go.id](mailto:bappeda@kulonprogokab.go.id), Website: [bappeda.kulonprogokab.go.id](http://bappeda.kulonprogokab.go.id)

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR: 050.13/22/IX/2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**NOMOR 050.13/40/IX/2013 TENTANG PENILAIAN RISIKO**

**PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan perubahan nomenklatur kegiatan maka dipandang perlu merubah penilaian risiko yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 050.13/40/IX/2013 tentang Penilaian Risiko;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 050.13/40/IX/2013 tentang Penilaian Risiko pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;

8. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan SPIP di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2012 Tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 050.13/40/IX/2013 tentang Penilaian Risiko Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
11. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 050.13/14/VIII/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 050.13/06.A/2012 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2011-2016;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 050.13/40/IX/2013 tentang Penilaian Risiko pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- KEDUA : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 050.13/40/IX/2013 tentang Penilaian Risiko pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 050.13/40/IX/2013 tentang Penilaian Risiko pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yakni pada lampiran, sehingga setelah diubah menjadi berbunyi sebagaimana Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates  
Pada tanggal 17 September 2015

Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo



Ir. AGUS LANGGENG BASUKI  
Pembina Utama Muda; IVc  
NIP. 19610801 198903 1 005

**LAMPIRAN:**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN  
KULON PROGO NOMOR 050.13/22/IX/2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
NOMOR 050.13/40/IX/2013 TENTANG PENILAIAN RISIKO  
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**PENILAIAN RESIKO**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**Kegiatan:**

1. Penyusunan RKPD
2. Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS
3. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
4. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan
5. Koordinasi Pemanfaatan Ruang
6. Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat, dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi
7. Penyusunan Data Statistik Daerah
8. Penyusunan Database Daerah dan Pengelolaan SIPD

## IDENTIFIKASI TUJUAN (AWAL)

**Unit Kerja** : **Bappeda Kulon Progo**

**Visi** : **Terwujudnya perencanaan yang baik untuk mencapai Kulon Progo yang sehat mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera**

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Kegiatan yang Mendukung Tujuan/Sasaran
1	Mewujudkan pelaksanaan sistem perencanaan yang efektif	Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan	Meningkatnya kinerja perencanaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan RKPD</li><li>2. Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS</li><li>3. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah</li><li>4. Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat, dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi</li><li>5. Penyusunan Data Statistik Daerah</li><li>6. Penyusunan Database Daerah dan Pengelolaan SIPD</li></ol>
2	Mewujudkan penataan ruang yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Terwujudnya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan</li><li>2. Koordinasi Pemanfaatan Ruang</li></ol>

## IDENTIFIKASI TUJUAN

**VISI: Terwujudnya perencanaan yang baik untuk mencapai Kulon Progo yang sehat mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera**

No.	Bidang/Program/Kegiatan	Tujuan/Sasaran			Penjelasan
		Aktual	Formal	Terkonfirmasi	
1.	<p><b>Bidang Perencanaan Pengendalian, Litbang Statistik</b></p> <p><i>Program Perencanaan Pembangunan</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Penyusunan RKPD</li> <li>2. Kegiatan Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS</li> <li>3. Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah</li> </ol>	Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan pembangunan	Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan	Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan	<p>Rumusan awal tujuan SKPD Bappeda ada 4 (empat). Selanjutnya pada pembahasan dalam rangka review renstra akhirnya tujuan SKPD Bappeda ditetapkan menjadi 2 (dua). Adapun 2 tujuan yang diubah yaitu "Terwujudnya peningkatan ketersediaan data yang valid dan akurat" dan "Terwujudnya peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga lainnya" merupakan bagian dari pendukung tujuan "Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan".</p>
2.	<p><b>Bidang Perencanaan Pengendalian, Litbang Statistik</b></p> <p><i>Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah</i></p>	Terwujudnya peningkatan ketersediaan data yang valid dan akurat	Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan	Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan	

No.	Bidang/Program/Kegiatan	Tujuan/Sasaran			Penjelasan
		Aktual	Formal	Terkonfirmasi	
	1. Kegiatan Penyusunan Data Statistik Daerah 2. Kegiatan Penyusunan Database Daerah dan Pengelolaan SIPD				
3.	<b>Bidang Pemerintahan</b> <i>Program Kerjasama Pengembangan IPTEK</i>  Kegiatan Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat, dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi	Terwujudnya peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga lainnya	Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan	Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan	
4.	<b>Bidang Praswil, Tata Ruang, dan Lingkungan Hidup</b> <i>Program Perencanaan Tata Ruang</i>  Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	Terwujudnya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang	Terwujudnya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang	

No.	Bidang/Program/Kegiatan	Tujuan/Sasaran			Penjelasan
		Aktual	Formal	Terkonfirmasi	
	Kawasan				
5.	<b>Bidang Praswil, Tata Ruang, dan Lingkungan Hidup</b>  <i>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</i>  Kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Ruang				



### PENGAMBARAN TAHAPAN PROSES PENCAPAIAN TUJUAN

Tujuan : Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan

Kegiatan : Penyusunan RKPD

No.	Awal/input	Proses	Output	Hantaran	Keterangan
1.	Rencana kerja dan anggaran (RKA), dokumen APBD	Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	DPPKA	
2.	SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembentukan tim</li> <li>- Penyiapan jadwal kegiatan</li> <li>- Penyusunan petunjuk teknis musrenbang</li> <li>- Predikasi kemampuan keuangan daerah</li> <li>- Penyusunan pagu usulan wilayah dan pagu forum SKPD</li> <li>- Pengumpulan aspirasi DPRD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Susunan tim</li> <li>- Jadwal perencanaan tahunan</li> <li>- Petunjuk teknis musrenbang</li> <li>- pagu usulan musrenbang dan forum SKPD</li> <li>- Rekapitulasi aspirasi DPRD</li> </ul>	PPTK	
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim koordinasi</li> <li>• Data dan informasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• perumusan permasalahan pembangunan daerah</li> <li>• perumusan rancangan kerangka ekonomi</li> </ul>	Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Kepala Bappeda	

No.	Awal/input	Proses	Output	Hantaran	Keterangan
		daerah dan kebijakan keuangan daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>• perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah</li> <li>• perumusan program prioritas beserta pagu indikatif</li> <li>• Penyajian rancangan awal RKPD</li> <li>• Konsultasi publik</li> </ul>			
4.	Usulan rencana kegiatan pembangunan desa	Pelaksanaan musrenbang kecamatan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, integrasi dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan.	Berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan  Rencana pembangunan tingkat kecamatan (RPTK) hasil musrenbang kecamatan	Kepala Bappeda	
5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rancangan awal RKPD yang sudah dibahas dalam konsultasi publik</li> <li>• Renstra SKPD</li> </ul>	Penyusunan rancangan Renja SKPD	Rancangan Renja SKPD	Kepala SKPD  Kepala Bappeda	
6.	Rancangan renja SKPD	Forum SKPD membahas rancangan Renja SKPD	Berita acara kesepakatan hasil forum SKPD kabupaten	Kepala SKPD	

No.	Awal/input	Proses	Output	Hantaran	Keterangan
			Penyempurnaan Renja SKPD	Kepala Bappeda	
7.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rancangan awal RKPD</li> <li>Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD</li> </ul>	Verifikasi untuk mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja SKPD sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD	Rancangan RKPD	Bupati	
8.	Rancangan RKPD	penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD melalui Musrenbang RKPD	Berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.  Rancangan akhir RKPD	Bupati	
9.	Rancangan akhir RKPD	Penetapan RKPD dengan Peraturan Bupati	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Bupati	
10.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rancangan Renja SKPD</li> <li>RKPD</li> </ul>	Penyempurnaan	Rancangan renja SKPD yang disempurnakan		

## IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RESIKO

Tujuan : Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan

Kegiatan : Penyusunan RKPD

No.	Resiko		Penyebab		Dapat/Tidak Dapat Dikendalikan	Dampak		Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Resiko	Rangking Prioritas
	Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak				
1.	Keterlambatan informasi kemampuan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PPTK</li> <li>• Kepala Bappeda</li> </ul>	DPPKA belum menyampaikan informasi kemampuan keuangan	DPPKA	Tidak dapat	Informasi kemampuan keuangan sebagai salah satu masukan untuk penyusunan pagu usulan wilayah tidak sesuai jadwal	Bappeda	Jarang (2)	Rendah (2)	4  (Dapat diterima)	3
2.	Keterlambatan pengumpulan penjangkaran aspirasi masyarakat melalui DPRD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PPTK</li> <li>• Kepala Bappeda</li> </ul>	DPRD tidak menyampaikan hasil penjangkaran aspirasi sesuai jadwal	DPRD	Tidak dapat	Ketidaktepatan waktu masuknya aspirasi dari DPRD mengakibatkan kurang lengkapnya bahan untuk pembasan forum SKPD	Bappeda	Sering (3)	Rendah (2)	6  (Diperlukan pengendalian yang cukup)	1
3.	Ketidaktepatan pemaduserasian usulan SKPD, hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PPTK</li> <li>• Kepala</li> </ul>	Perencana pengampu urusan	Tim koordinasi	Dapat	Ketidaktepatan pemaduserasian	Bappeda	Jarang (2)	Rendah (2)	4  (Dapat	2

No.	Resiko		Penyebab		Dapat/Tidak Dapat Dikendalikan	Dampak		Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Resiko	Rangking Prioritas
	Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak				
	musrenbang kecamatan, aspirasi DPRD	Bappeda	tidak cermat			Ketidaktercermatan pembahasan usulan mengakibatkan kualitas keluaran RKPD kurang.	SKPD			diterima)	
4.	Keterlambatan penyusunan RKPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PPTK</li> <li>• Kepala Bappeda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterlambatan penetapan RKP</li> <li>• Keterlambatan penetapan RKPD DIY</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah pusat</li> <li>• Bappeda DIY</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak Dapat</li> <li>• Tidak Dapat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterlambatan penyusunan RKP oleh pusat dapat menyebabkan terganggunya jadwal perencanaan tahunan.</li> <li>• Keterlambatan penyusunan RKPD DIY oleh Bappeda DIY dapat menyebabkan terganggunya jadwal perencanaan tahunan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</li> <li>Pemkab Kulon Progo</li> </ul>	Jarang (2)	Rendah (2)	4 (Dapat diterima)	4

## RENCANA TINDAK PERBAIKAN KEGIATAN PENGENDALIAN

Tujuan : Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan

Kegiatan : Penyusunan RKPD

No.	Pernyataan Resiko	Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Penanggungjawab Pelaksanaan Perbaikan	Target Waktu Penyelesaian
1.	Keterlambatan informasi kemampuan keuangan	Peningkatan koordinasi	PPTK	1 bulan
2.	Keterlambatan pengumpulan penjangkaran aspirasi masyarakat melalui DPRD	Peningkatan koordinasi	Kepala Bappeda	1 bulan
3.	Ketidaktepatan pepaduserasian usulan SKPD, hasil musrenbang kecamatan, aspirasi DPRD	Peningkatan komunikasi	Kepala-kepala Bidang	2 bulan
4.	Keterlambatan penyusunan RKPD	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penjadwalan</li><li>• Peningkatan kinerja</li></ul>	Ketua Tim Penyusunan RKPD	2 bulan

## PENGAMBARAN TAHAPAN PROSES PENCAPAIAN TUJUAN

Tujuan : Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan

Kegiatan : Penyusunan KUA PPAS

No.	Awal/input	Proses	Output	Hantaran	Keterangan
1.	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dokumen APBBD	Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	DPPKA	
2.	SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pembentukan tim</li> <li>- penyiapan jadwal kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- susunan tim</li> <li>- jadwal perencanaan tahunan</li> </ul>	PPTK	
3.	Tim koordinasi data dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- permintaan data kemampuan keuangan daerah</li> <li>- permintaan materi KUA PPAS dan pra RKA</li> <li>- pembahasan kerangka regulasi penyusunan KUA dan PPAS</li> <li>- penjabaran tema RKP dan asumsi dasar yang digunakan dalam APBN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data kemampuan keuangan daerah</li> <li>- Materi KUA dan PPAS dan pra RKA</li> <li>- Rekapitulasi Usulan KUA dan PPAS</li> <li>- Kebijakan ekonomi makro</li> <li>- Kebijakan Pendapatan</li> <li>- Kebijakan Belanja</li> <li>- Asumsi yang digunakan dalam penyusunan RAPBD</li> </ul>	Kepala Bappeda	

No.	Awal/input	Proses	Output	Hantaran	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- pejabaran tema RKPD DIY dan asumsi dalam penyusunan RKPD DIY</li> <li>- penyusunan data ekonomi makro</li> <li>- data rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan</li> </ul>			
4.	Materi KUA dan PPAS dan pra RKA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat koordinasi dengan bidang pengampu urusan</li> <li>- Pencermatan Usulan</li> <li>- Desk dengan SKPD</li> <li>- Pembahasan Usulan dengan Tim Teknis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekapitulasi Usulan setelah dilakukan desk dengan SKPD</li> <li>- Rekapitulasi usulan setelah dilakukan pembahasan dengan tim teknis</li> </ul>	Kepala Bappeda	
5.	Rancangan KUA dan PPAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyempurnaan KUA PPAS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Materi KUA PPAS yang telah disempurnakan</li> </ul>	Bupati	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ekspose KUA dan PPAS ke Kepala Daerah/Bupati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Materi KUA PPAS yang telah disempurnakan oleh Kepala Daerah</li> </ul>	PPTK	
6.	Materi KUA PPAS yang telah disempurnakan oleh Kepala Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsultasi KUA dan PPAS ke Gubernur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Materi KUA PPAS yang telah disempurnakan oleh Gubernur</li> </ul>	PPTK	



No.	Awal/input	Proses	Output	Hantaran	Keterangan
7.	Rancangan KUA PPAS	- Penyerahan Dokumen Rancangan KUA PPAS ke DPRD	- Materi KUA PPAS yang telah dibahas dengan DPRD	PPTK	
		- pembahasan rancangan KUA PPAS	- MOU Nota Kesepakatan KUA dan PPAS antara pemerintah daerah dan DPRD	DPPKA	

## IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RESIKO

Tujuan : Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan

Kegiatan : Penyusunan KUA PPAS

No.	Resiko		Penyebab		Dapat/Tidak Dapat Dikendalikan	Dampak		Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Resiko	Rangking Prioritas
	Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak				
1.	Keterlambatan informasi keuangan	- PPTK - Kepala Bappeda	DPPKA belum menyampaikan informasi kemampuan keuangan daerah	DPPKA	Tidak dapat	Informasi kemampuan keuangan sebagai salah satu masukan untuk penyusunan Pagu KUA PPAS tidak sesuai jadwal	Bappeda	Jarang (2)	Rendah (2)	Dapat diterima (4)	2
2.	Keterlambatan pengumpulan materi KUA PPAS oleh SKPD	- PPTK - Kepala Bappeda	SKPD terlambat menyampaikan usulan KUA PPAS	SKPD	Tidak dapat	Jadwal penyusunan menjadi mundur	Bappeda	Jarang (2)	Rendah (2)	Dapat diterima (4)	1
3.	Keterlambatan penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD	- Pemerintah Daerah	Lamanya pembahasan dalam rapat kerja antara eksekutif dan legislatif	DPRD	Dapat	Penandatanganan Nota kesepakatan tidak sesuai jadwal	Pemerintah Kabupaten KUIon Progo	Jarang (2)	Rendah (2)	Dapat diterima (4)	3

## RENCANA TINDAK PERBAIKAN KEGIATAN PENGENDALIAN

Tujuan : Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan

Kegiatan : Penyusunan KUA PPAS

No.	Pernyataan Resiko	Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Penanggungjawab Pelaksanaan Perbaikan	Target Waktu Penyelesaian
1.	Keterlambatan informasi keuangan	Peningkatan koordinasi	PPTK	2 hari
2.	Keterlambatan pengumpulan materi KUA PPAS oleh SKPD	Peningkatan koordinasi	Kepala Bappeda	2 hari
3.	Keterlambatan penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD	Peningkatan komunikasi dan negosiasi	Kepala Bappeda dan Sekretaris Daerah	1 minggu

## PENGAMBARAN TAHAPAN PROSES PENCAPAIAN TUJUAN

Tujuan : Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan

Kegiatan : Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

No.	Awal/input	Proses	Output	Hantaran	Keterangan
1.	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dokumen APBD	Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	DPPKA	
2.	SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembentukan tim</li> <li>- Penyiapan jadwal kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Susunan tim</li> <li>- Jadwal perencanaan tahunan</li> </ul>	PPTK	
3.	Tim Pelaksana SKPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengolah data kinerja dari unit kerja SKPD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan kinerja fisik dan keuangan setiap bulan (Pelaksanaan kinerja APBD)</li> <li>- Laporan kinerja kegiatan dan Program setiap triwulan (Evaluasi Hasil Renja SKPD)</li> </ul>	Kepala Bappeda	
4.	Tim Pelaksana Bappeda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konfirmasi dan validasi data kinerja SKPD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Pengendalian Pelaksanaan APBD</li> <li>- Laporan Evaluasi Hasil RKPD setiap triwulan yang</li> </ul>	Kepala Bappeda	

No.	Awal/input	Proses	Output	Hantaran	Keterangan
			valid		
5.	Materi Pelaporan Pengendalian Kinerja APBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat koordinasi dengan bidang pengampu urusan</li> <li>- Pencermatan data kinerja kegiatan</li> <li>- Desk dengan SKPD</li> <li>- Monitoring lokasi pelaksanaan kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekapitulasi permasalahan dan solusi kegiatan setelah dilakukan desk dengan SKPD</li> </ul>	Kepala Bappeda	
6.	Materi Pelaporan Evaluasi Hasil RKPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat koordinasi dengan bidang pengampu urusan</li> <li>- Pencermatan data kinerja kegiatan dan program</li> <li>- Desk dengan SKPD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekapitulasi faktor-faktor pendorong dan penghambat kinerja Urusan dan Sasaran Pemerintah daerah</li> </ul>	Kepala Bappeda	
7.	Penyampaian Pelaporan Evaluasi Renja SKPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyerahan Dokumen Evaluasi Renja SKPD setiap Triwulan kepada Bupati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Evaluasi Renja SKPD</li> </ul>	Kepala Bappeda	
8.	Penyampaian Pelaporan Evaluasi RKPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyerahan Dokumen Evaluasi RKPD setiap Triwulan kepada Gubernur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Evaluasi RKPD</li> </ul>	Bupati	

## IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RESIKO

Tujuan : Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan

Kegiatan : Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

No.	Resiko		Penyebab		Dapat/Tidak Dapat Dikendalikan	Dampak		Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Resiko	Rangking Prioritas
	Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak				
1.	Keterlambatan entry data kinerja SKPD secara berkala setiap bulan dan triwulanan dengan sistem informasi monev (emonev)	- PPTK - Kepala Bappeda	SKPD tidak mematuhi waktu penyampaian pelaporan yang telah ditetapkan mulai tanggal 1 s.d 10 setiap bulan	SKPD	Dapat dikendalikan	Informasi kinerja kurang valid	SKPD Bappeda	Jarang (2)	Rendah Sekali (1)	Dapat diterima (2)	2
2.	Kurang akurasinya data kinerja kegiatan dan program	- PPTK - Kepala Bappeda	Pengisian data yang tidak valid dan tidak sesuai dengan metadata yang ditetapkan	SKPD	Tidak Dapat dikendalikan	Evaluasi kinerja SKPD dan Pemerintah Daerah kurang valid	Pemerintah Daerah	Sering (3)	Rendah (2)	Diperlukan pengendalian yang cukup (6)	1
3.	Keterlambatan penyampaian pelaporan kinerja triwulanan RKPD kepada Gubernur	- Pemerintah Daerah	Penyampaian data kinerja kurang valid sehingga membutuhkan konfirmasi ulang dengan SKPD	SKPD Bappeda	Dapat	Penyampaian pelaporan tidak sesuai jadwal yang ditentukan	Pemerintah Daerah	Sering (3)	Rendah (2)	Diperlukan pengendalian yang cukup (6)	3

## RENCANA TINDAK PERBAIKAN KEGIATAN PENGENDALIAN

Tujuan : Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan

Kegiatan : Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

No.	Pernyataan Resiko	Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Penanggungjawab Pelaksanaan Perbaikan	Target Waktu Penyelesaian
1.	Keterlambatan entry data kinerja SKPD secara berkala setiap bulan dan triwulanan dengan sistem informasi monev (emonev)	Peningkatan koordinasi internal SKPD	PPTK	5 hari
2.	Kurang akurasinya data kinerja kegiatan dan program	Peningkatan kapasitas SDM pelaksana dan koordinasi	Kepala Bappeda	2 hari
3.	Keterlambatan penyampaian pelaporan kinerja triwulanan RKPD kepada Gubernur	Peningkatan komunikasi dan koordinasi	Kepala Bappeda dan Sekretaris Daerah	3 hari

### PENGAMBARAN TAHAPAN PROSES PENCAPAIAN TUJUAN

Tujuan : Terwujudnya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang

Kegiatan : Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan

No.	Awal/input	Proses	Output	Hantaran	Keterangan
1.	Penganggaran kegiatan APBD: Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	DPA	- Kepala Bappeda  - DPPKA	
2.	SDM	Pembentukan Tim	Susunan Tim koordinasi penyusunan RDTR Kawasan	Kepala Bappeda	
3.	Kerangka acuan kerja, panitia pengadaan	Pengadaan Jasa Konsultasi	Terpilih penyedia jasa konsultasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Bappeda/ Pegguna Anggaran</li> <li>• PPK</li> <li>• PPTK</li> </ul>	
4.	Terpilihnya penyedia jasa konsultasi	Penyusunan materi	Draft laporan RDTR <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan pendahuluan</li> <li>• Laporan antara</li> <li>• Laporan akhir</li> <li>• Matek, Eksekutif Summery</li> <li>• Draft Raperda RDTR dan Peraturan Zonasi</li> <li>• Album Peta</li> </ul>	Kepala Bappeda/ Pegguna Anggaran	



No.	Awal/input	Proses	Output	Hantaran	Keterangan
5.	Draft laporan RDTR kawasan - Laporan pendahuluan - Laporan antara - Laporan akhir	Pembahasan draft laporan	Laporan RDTR Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Bappeda/ Pengguna Anggaran</li> <li>• PPTK</li> </ul>	
6.	Laporan RDTR Kawasan	Finalisasi materi RDTR	Materi teknis RDTR Kawasan <ul style="list-style-type: none"> <li>- RDTR Kawasan</li> <li>- Matek, Eksekutif Summery</li> <li>- Draft Raperda RDTR dan Peraturan Zonasi</li> <li>- Album Peta</li> </ul>	Kepala Bappeda	

## IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RESIKO

Tujuan : Terwujudnya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang

Kegiatan : Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan

No.	Resiko		Penyebab		Dapat/Tidak Dapat Dikendalikan	Dampak		Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Resiko	Rangking Prioritas
	Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak				
a.	Kegagalan proses pengadaan jasa konsultasi penyusunan RDTR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PPTK</li> <li>• Kepala Bappeda</li> </ul>	Penyedia jasa konsultasi yang menyusun materi teknis RDTR tidak bisa diperoleh	Penyedia jasa konsultasi	Tidak dapat	Kegagalan proses pengadaan jasa konsultasi mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan tertunda atau bahkan gagal.	PPTK	Jarang-sering (2,5)	Rendah (2)	5  (Diperlukan pengendalian yang cukup)	2
b.	Penyedia jasa konsultasi tidak mematuhi jadwal pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PPTK</li> <li>• Kepala Bappeda</li> </ul>	Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia jasa konsultasi	Penyedia jasa konsultasi	Dapat	Penyedia jasa konsultasi tidak mematuhi jadwal pekerjaan	PPTK	Jarang-sering (2,5)	Tinggi (3)	7,5  (Diperlukan pengendalian yang cukup)	1

## RENCANA TINDAK PERBAIKAN KEGIATAN PENGENDALIAN

Tujuan : Terwujudnya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang  
Kegiatan : Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan

No.	Pernyataan Resiko	Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Penanggungjawab Pelaksanaan Perbaikan	Target Waktu Penyelesaian
1.	Kegagalan proses pengadaan jasa konsultasi penyusunan RDTR	Pelaksanaan pengadaan lebih awal	PPTK ULP	3 bulan
2.	Penyedia jasa konsultasi tidak mematuhi jadwal pekerjaan	Peringatan Pembahasan intensif	PPTK	3 bulan

## PENGAMBARAN TAHAPAN PROSES PENCAPAIAN TUJUAN

Tujuan : Terwujudnya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang

Kegiatan : Koordinasi Pemanfaatan Ruang

No.	Awal/input	Proses	Output	Hantaran	Keterangan
1.	Penganggaran kegiatan APBD: Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	DPA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Bappeda</li> <li>• DPPKA</li> </ul>	
2.	SDM	Pembentukan Tim	Susunan Tim koordinasi pelaksanaan koordinasi pemanfaatan ruang /tim BKPRD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Bappeda</li> </ul>	
3.	Daftar isian tabel pemanfaatan ruang atau form permohonan rekomendasi tata ruang	Penyampaian daftar ke SKPD/Kecamatan atau pemohon	Isian tabel pemanfaatan ruang atau isian surat permohonan rekomendasi tata ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Bappeda Pengguna Anggaran</li> <li>• PPTK</li> <li>• SKPD/Kecamatan</li> </ul>	
4.	Isian tabel pemanfaatan ruang atau isian surat permohonan rekomendasi tata ruang	Rapat Koordinasi Pemanfaatan Ruang atau rapat koordinasi BKPRD	Informasi pemanfaatan ruang atau kesesuaian ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekda</li> <li>• Kepala Bappeda/ Pengguna Anggaran</li> <li>• PPTK</li> <li>• SKPD/Kecamatan</li> </ul>	
5.	Informasi pemanfaatan ruang atau kesesuaian ruang	Pengolahan data dan analisa	Laporan Koordinasi Pemanfaatan Ruang atau rekomendasi tata ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Bappeda/ Pengguna Anggaran</li> <li>• PPTK</li> </ul>	

## IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RESIKO

Tujuan : Terwujudnya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang

Kegiatan : Koordinasi Pemanfaatan Ruang

No	Resiko		Penyebab		Dapat/Tidak Dapat Dikendalikan	Dampak		Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Resiko	Rangking Prioritas
	Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak				
a.	Daftar isian tabel pemanfaatan ruang atau isian surat permohonan rekomendasi tata ruang tidak disampaikan tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PPTK</li> <li>• Kepala Bappeda</li> </ul>	Penyampaian daftar isian pemanfaatan ruang dari SKPD/ Kecamatan terlambat	SKPD/ Kecamatan/ Pemohon	Dapat	Bahan rapat koordinasi pemanfaatan ruang atau rakor BKPRD tidak bisa diperoleh tepat waktu.	PPTK	Jarang-sering (2,5)	Rendah (2)	5  (Diperlukan pengendalian yang cukup)	2
b.	SKPD/Kecamatan tidak hadir dalam rapat koordinasi pemanfaatan ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PPTK</li> <li>• Kepala Bappeda</li> </ul>	Acara bersamaan dengan agenda dari SKPD/ Kecamatan	SKPD/ Kecamatan	Dapat	Koordinasi pemanfaatan ruang atau rakor BKPRD tidak optimal	PPTK	Jarang-sering (2,5)	Rendah (2)	7,5  (Diperlukan pengendalian yang cukup)	1

## RENCANA TINDAK PERBAIKAN KEGIATAN PENGENDALIAN

Tujuan : Terwujudnya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang

Kegiatan : Koordinasi Pemanfaatan Ruang

No.	Pernyataan Resiko	Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Penanggungjawab Pelaksanaan Perbaikan	Target Waktu Penyelesaian
1.	Daftar isian tabel pemanfaatan ruang atau isian surat permohonan rekomendasi tata ruang tidak disampaikan tepat waktu	Peningkatan koordinasi	PPTK Kepala Bidang	1 bulan
2.	SKPD/Kecamatan tidak hadir dalam rapat koordinasi pemanfaatan ruang atau rakor BKPRD	Peningkatan koordinasi	PPTK Kepala Bidang	1 bulan

### PENGGAMBARAN TAHAPAN PROSES PENCAPAIAN TUJUAN

Tujuan : Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan

Kegiatan : Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi

No.	Awal/input	Proses	Output	Hantaran	Keterangan
1.	Penganggaran kegiatan APBD: Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	DPA	Kepala Bappeda  DPPKA	
2.	SDM	Pembentukan Tim	Susunan Tim koordinasi kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi	Kepala Bappeda	
3.	Permohonan Ijin menjadi lokasi KKN/KKL	Verifikasi kelengkapan persyaratan Permohonan dari Perguruan Tinggi	Ijin sebagai lokasi KKN/KKL	Sekretaris daerah	

## IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RESIKO

Tujuan : Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan

Kegiatan : Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi

No.	Resiko		Penyebab		Dapat/Tidak Dapat Dikendalikan	Dampak		Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Resiko	Rangking Prioritas
	Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak				
1.	Keterlambatan Ijin persetujuan sebagai lokasi KKN/KKL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PPTK</li> <li>• Kepala Bappeda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persyaratan yang kurang lengkap</li> <li>• Pejabat penandatanganan Ijin KKN/KKL tidak berada di tempat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT</li> <li>• Pemkab KP</li> </ul>	Tidak dapat	Terlambatnya Ijin persetujuan sebagai lokasi KKN/KKL.	PPTK	Jarang-sering (2,5)	Rendah sekali (1)	Dapat diterima (2,5)	1



## RENCANA TINDAK PERBAIKAN KEGIATAN PENGENDALIAN

Tujuan : Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan

Kegiatan : Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi

No.	Pernyataan Resiko	Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Penanggungjawab Pelaksanaan Perbaikan	Target Waktu Penyelesaian
1.	Keterlambatan Ijin persetujuan sebagai lokasi KKN/KKL	Ketelitian dalam verifikasi permohonan ijin KKN/KKL  Peningkatan koordinasi dan komunikasi	PPTK	1 bulan

## PENGAMBARAN TAHAPAN PROSES PENCAPAIAN TUJUAN

Tujuan : Terwujudnya Peningkatan Kinerja Perencanaan

Kegiatan : Penyusunan Data Statistik Daerah

No.	Awal/input	Proses	Output	Hantaran	Keterangan
1.	Program dan kegiatan APBD: Penyusunan Data Statistik Daerah	Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)	DPA	DPPKA	
2.	SDM	Pembentukan tim	Susunan tim koordinasi	Kepala Bappeda	
3.	Data sektoral/data sekunder SKPD	Pengumpulan, analisis, penyusunan data statistik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data untuk penyusunan buku: Inflasi, PDRB, IPM, Inkesra, Gini Ratio, Daerah Dalam Angka</li> <li>• Draft Buku: Inflasi, PDRB, IPM, Inkesra, Gini Ratio, Daerah Dalam Angka</li> </ul>	Kepala Bappeda	
4.	Draft Buku: Inflasi, PDRB, IPM, Inkesra, Gini Ratio, Daerah Dalam Angka	Ekspose Data Statistik Daerah	Draft final buku: Inflasi, PDRB, IPM, Inkesra, Gini Ratio, Daerah Dalam Angka	Kepala Bappeda	
5.	Draft final buku: Inflasi, PDRB, IPM, Inkesra, Gini Ratio, Daerah Dalam Angka	Penyusunan laporan hasil penyusunan, pengumpulan, pengolahan, updating dan analisis data statistik daerah	Buku: Inflasi, PDRB, IPM, Inkesra, Gini Ratio, Daerah Dalam Angka	Bupati	

## FORM IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RESIKO

Tujuan : Terwujudnya Peningkatan Kinerja Perencanaan

Kegiatan : Penyusunan Data Statistik Daerah

No	Resiko		Penyebab		Dapat/Tidak Dapat Dikendalikan	Dampak		Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Resiko	Rangking Prioritas
	Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak				
1.	Tidak tersedianya data yang valid dan mutakhir untuk penyusunan data statistik daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PPTK</li> <li>• Kepala Bappeda</li> </ul>	Data sekunder dari SKPD tidak valid	SKPD sektoral sebagai sumber data sekunder	Tidak dapat	Kualitas data rendah (validitas dan kemutakhiran)	SKPD sumber data	Jarang – Sering (2,5)	Rendah (2)	5  (Diperlukan pengendalian yang cukup)	2
2.	Keterlambatan penyusunan data statistik daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PPTK</li> <li>• Kepala Bappeda</li> </ul>	Prose pengumpulan, analisis dan penyusunan data statistik tidak dilaksanakan tepat waktu	SKPD sektoral  BPS	Tidak dapat	Proses pengumpulan dan pengolahan data statistik dilakukan oleh BPS. Kegiatan ini bagi BPS merupakan pekerjaan tambahan sehingga seringkali jadwal pelaksanaan pekerjaan tidak dilaksanakan tepat waktu	Bappeda  Pemkab Kulon Progo	Sering (3)	Rendah (2)	6  (Diperlukan pengendalian yang cukup)	1

## RENCANA TINDAK PERBAIKAN KEGIATAN PENGENDALIAN

Tujuan : Terwujudnya Peningkatan Kinerja Perencanaan

Kegiatan : Penyusunan Data Statistik Daerah

No.	Pernyataan Resiko	Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Penanggungjawab Pelaksanaan Perbaikan	Target Waktu Penyelesaian
1.	Tidak tersedianya data yang valid dan mutakhir untuk penyusunan data statistik daerah	Perbaikan data	Kepala SKPD sumber data sekunder	3 bulan
2.	Keterlambatan penyusunan data statistik daerah	Penjadwalan	Kepala BPS	3 bulan

## PENGGAMBARAN TAHAPAN PROSES PENCAPAIAN TUJUAN

Tujuan : Terwujudnya Peningkatan Kinerja Perencanaan

Kegiatan : Penyusunan Data Base Daerah dan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah

No.	Awal/input	Proses	Output	Hantaran	Keterangan
1.	Program dan Kegiatan APBD Penyusunan Data Base Daerah	Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)	DPA	DPPKA	
2.	SDM	Pembentukan Tim	Susunan Tim Koordinasi	Kepala Bappeda	
3.	Data Sektoral/Data Primer/ Data Sekunder SKPD	Pengumpulan, Klarifikasi, Penyusunan Data Base Daerah dan SIPD	Data Primer, Sekunder, dari SKPD	Kepala Bappeda	
4.	Draft Buku Data Base Daerah dan Data SIPD	Ekspose Data Base Daerah dan SIPD	Draft Buku Data Base Daerah dan SIPD	Kepala Bappeda	
5.	Draft Buku Data Base Daerah dan Data SIPD	Penyusunan Buku Data Base Daerah dan SIPD	Buku Data Base Daerah dan SIPD	Bupati	

## IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RESIKO

Tujuan : Terwujudnya Peningkatan Kinerja Perencanaan

Kegiatan : Penyusunan Data Base Daerah dan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah

No	Resiko		Penyebab		Dapat/Tidak Dapat Dikendalikan	Dampak		Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Resiko	Rangking Prioritas
	Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak				
1.	Tidak tersedianya data pada tahun N	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PPTK</li> <li>• Kepala Bappeda</li> </ul>	Data Primer dari SKPD belum terkumpul	SKPD Sektoral	Tidak Dapat	Tersedianya data terlambat	SKPD sumber data	Sering (3)	Rendah (2)	Diperlukan pengendalian yang cukup (6)	1
2.	Keterlambatan Penyusunan Data Base Daerah dan SIPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PPTK</li> <li>• Kepala Bappeda</li> </ul>	Proses pengumpulan Data Primer dari SKPD berjalan lambat	SKPD Sektoral	Tidak Dapat	Akibat dari proses pengumpulan data primer yang terlambat mengakibatkan keterlambatan penyusunan data base daerah	Bappeda	Sering (3)	Rendah (2)	Diperlukan pengendalian yang cukup (6)	2

## RENCANA TINDAK PERBAIKAN KEGIATAN PENGENDALIAN

Tujuan : Terwujudnya Peningkatan Kinerja Perencanaan

Kegiatan : Penyusunan Data Base Daerah dan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah

No.	Pernyataan Resiko	Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Penanggungjawab Pelaksanaan Perbaikan	Target Waktu Penyelesaian
1.	Tidak tersedianya data pada tahun N	Perketat koordinasi dan penjadwalan	Kepala SKPD Sumber Data	6 Bulan
2.	Keterlambatan Penyusunan Data Base Daerah dan SIPD	Perketat koordinasi dan penjadwalan	Anggota TIM Koordinasi	6 Bulan